

KEBANGKITAN POPULISME, SOLUSI ALTERNATIF, DAN RELEVANSINYA BAGI FENOMENA POPULISME DI INDONESIA

Yasintu Harjon¹, Mathias Jebaru Adon², Dionisius Sunardi³

¹cainharjon@gmail.com, ²mathiasjebaruadon@gmail.com, ³anhosunardy@gmail.com

¹Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

²Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

³Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas pengaruh media massa bagi kebangkitan populisme di Indonesia. Media massa pada hakikatnya adalah media yang mengedepankan kebenaran dalam menyampaikan informasi. Media massa hadir untuk menuntun masyarakat pada pengetahuan dan kebenaran sejati tentang suatu peristiwa atau kejadian. Namun realitas yang terjadi di Indonesia, media masa sering menampilkan informasi yang saling bertentangan satu sama lain. Media massa kerap kali menyajikan informasi demi memenuhi kepentingan kelompok dan aktor politik tertentu. Akibatnya, media massa menjadi lembah bertumbuh subur nya populisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan tentang pengaruh media massa bagi kebangkitan populisme. Studi ini menemukan bahwa penyebab berkembangnya populisme karena media massa tidak mengedepankan obyektivitas dalam menyampaikan informasi dan berita. Solusi yang ditawarkan penelitian ini dalam rangka meminimalisir hal tersebut ialah media massa perlu kembali kepada kesejatan dirinya sebagai media yang mengutamakan kebenaran dan obyektivitas. Selain itu, diperlukan nalar kritis masyarakat dalam mengonsumsi aneka informasi serta pentingnya fungsi kontrol pemerintah dalam mengawasi ambiguitas berita atau informasi yang disajikan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Media Massa, Populisme, Subyektif Provokatif, Disintegrasi.

Abstract

This study aims to discuss the influence of mass media on the rise of populism in Indonesia. Mass media is essentially a media that puts forward the truth in conveying information. The mass media is here to guide people to the true knowledge and truth about an event or occurrence. However, the reality that is happening in Indonesia is that the mass media often display conflicting information. The mass media often present information for the sake of meeting the interests of certain political groups and actors. As a result, the mass media has become a growing valley for populism in Indonesia. This study uses a literature study on the influence of mass media on the rise of populism. This study finds that the cause of the development of populism is because the mass media do not prioritize objectivity in conveying information and news. The solution offered by this research to minimize this is that the mass media need to return to their authenticity as a media that prioritizes truth and objectivity. In addition, the community needs critical reasoning in consuming various information and the importance of the government's control function in overseeing the ambiguity of news or information presented to the public.

Keywords: *Mass Media; Populism; Subjectively Provocative; Disintegration*

PENDAHULUAN

Gerakan populisme semakin subur dari tahun ke tahun. Kebangkitan populisme yang pada awalnya berkembang di negara Amerika Serikat kini menjamur ke segala penjuru dunia. Penyebaran dan perkembangannya begitu cepat dan memengaruhi panggung perpolitikan dunia. Fenomena munculnya populisme tidak dapat dipungkiri selalu berwajah ganda. Di satu sisi, populisme hadir

mengakomodir aspirasi kaum terpinggir. Namun, di sisi lain justru merusak iklim politik, karena mengakibatkan disintegrasi dan ketidakstabilan politik. Salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan populisme yang begitu cepat di berbagai belahan dunia karena penyebaran informasi melalui media massa; media cetak, elektronik, media sosial, dan sebagainya yang tidak kredibel dan jauh dari kebenaran atau bersifat subyektif

provokatif. Secara khusus dalam menyajikan informasi terkait dengan sistem pemerintahan yang sedang berlangsung yang melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akibatnya, masyarakat menghendaki pemerintahan yang lebih baik, yakni pemimpin populis. Namun, apakah kaum populis dapat meretas masalah yang sama ketika terpilih dan menduduki kursi pemerintahan? Ataukah malahan sebaliknya, aktor populis yang terpilih dalam pesta demokrasi justru semakin memperburuk kondisi sosial, ekonomi dan politik suatu bangsa?

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Akmaliah tahun 2019 menemukan bahwa, ketidakakuratan informasi merupakan ladang subur berkembangnya hoaks dan ujaran kebencian (Akmaliah, 2019). Hal ini semakin diperparah ketika nalar kritis seseorang hancur, sehingga kemampuannya menjadi lumpuh dalam membuat batas yang tegas antara fiksi dan kebenaran. Apalagi jika isu tersebut ditautkan dengan isu sosial dan politik yang cenderung provokatif. Sehingga bagi Akmaliah (2019), kehadiran media sosial dan menguatnya populisme yang bertautan dengan predator politik tidak pernah bermuara kepada kebaikan dan kestabilan politik suatu bangsa. Melainkan semakin memperparah dan menghancurkan lawan politik bahkan menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri. Di samping itu, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Hilmy tahun 2020 dalam artikelnya berjudul "Fenomena Gerakan Populisme dalam Kemunduran Demokrasi," menegaskan bahwa salah satu penyebab kemunduran demokrasi dan disintegrasi bangsa ialah berkembangnya gerakan populisme di seluruh dunia (Hilmy, 2020). Hilmy melihat kekhaosan yang disebabkan oleh kebangkitan populisme itu nyata dalam fenomena menguatnya paham nativisme yang secara tegas membuat distingsi antara penduduk lokal dengan pendatang. Sehingga berdampak pada ketidakstabilan demokrasi sehingga menuai perpecahan. Hal ini dipertegas oleh Bachtiar Nur Budiman yang mengatakan populisme dapat mempolarisasi dan menghancurkan kehidupan sosial dan politik masyarakat di Indonesia bila tidak segera di atasi (Budiman, 2021).

Beberapa artikel di atas secara tegas memperlihatkan kehadiran dan kebangkitan populisme. Pertautan populisme dengan politik dalam kenyataannya membahayakan stabilitas demokrasi suatu bangsa sehingga tidak jarang berujung pada perpecahan. Di

Indonesia fenomena populisme semakin menguat karena munculnya populisme Islam yang bertautan dengan predator politik yang melahirkan isu-isu yang menghadapkan kaum pribumi dengan orang asing. Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji secara mendalam pengaruh media massa bagi kebangkitan dan perkembangan populisme dan relevansinya bagi fenomena populisme di Indonesia. Tesis yang menjadi kekhasan penelitian ini pada peranan penting media massa bagi perkembangan populisme dan solusi dalam kehidupan berbangsa di Indonesia.

METODOLOGI

Metodologi penulisan artikel menggunakan metode studi kepustakaan. Sumber-sumber yang digunakan terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas fenomena populisme. Artikel ini digarap dalam beberapa bagian. Pada bagian pertama, penulis berusaha menguraikan latar belakang penulisan yang memuat di dalamnya penelitian terdahulu dan kebaruan atau originalitas artikel penulis. Kedua, membahas selang pandang hakikat media massa, fungsi, dan dinamika perkembangannya serta definisi populisme dan faktor-faktor kebangkitannya. Pada bagian ketiga, penulis memperlihatkan bagaimana media massa menjadi instrumen penting dalam kebangkitan populisme dan pengaruhnya terhadap sisi permintaan dan sisi penawarannya. Pada bagian keempat, penelitian ini berusaha memberikan solusi alternatif dalam meminimalisir laju perkembangan populisme serta relevansinya di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Hakikat dan Fungsi Media Massa

Perkembangan media massa yang begitu cepat seiring laju peradaban manusia. Pada zaman dahulu, manusia mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan orang lain dengan bantuan media cetak, tetapi kini manusia sangat dipermudah dalam segalanya berkat kemunculan alat komunikasi yang semakin canggih, seperti; radio, TV, HP, dan internet. Kemunculan dan kehadiran media massa dengan demikian sejatinya tidak terlepas dari kepentingan dan kebutuhan manusia. Media massa adalah sarana-sarana teknis yang membantu manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Secara absolut manusia memerlukan sarana-sarana tersebut sebagai sesuatu yang sangat esensial dalam hidupnya. Oleh karena itu, secara umum

beberapa fungsi media massa seperti sebagai mediator informasi, fungsi pedagogis, dan fungsi hiburan. Sebagai mediator informasi, media massa berfungsi untuk menjadi perantara dalam memberikan berita dan informasi kepada masyarakat di seluruh dunia.

Berita dan informasi itu dapat diperoleh dari berbagai kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat yang diolah sedemikian rupa sebelum kemudian disebarkan kembali ke masyarakat. Berkaitan dengan fungsi pedagogis, letak dasariah fungsi pedagogis media massa ialah ketika menyiarkan atau memberitakan informasi dan hasil analisisnya kepada masyarakat. Apa yang disajikan media massa ke ruang publik di dalamnya mengandung unsur pendidikan dan secara tidak langsung ia pada saat itu memfungsikan dirinya sebagai seorang pendidik (Nurudin, 2007). Sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak tahu hal-hal tertentu, dengan pemberitaan media massa kemudian menjadi tahu.

Selain itu, adapun fungsi lain media massa ialah *entertainment* atau hiburan, di mana media massa menyajikan berita atau acara yang menghibur masyarakat. Biasanya, fungsi *entertainment* ini lebih banyak memikat perhatian publik. Sebab, beragam acara yang bersifat humoris yang direkayasa sedemikian rupa oleh media massa itu sungguh membantu mengobati kejenuhan masyarakat. Sehingga, masyarakat yang penuh dengan aneka persoalan bisa menuai kebahagiaan dan sukacita berkat berita dan acara yang disajikan media massa (tidak peduli sifatnya yang temporer). Beberapa fungsi media massa tersebut menunjukkan bahwa media massa mempunyai aneka fungsi bagi manusia. Kehadiran dan adanya bukanlah sesuatu yang bersifat artifisial semata, namun sebagai sesuatu yang sangat esensial. Artinya, adanya media massa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban manusia. Kehadirannya memungkinkan dan sekaligus mempermudah manusia dalam banyak hal. Singkatnya, media massa ada oleh manusia, untuk manusia, dan demi kepentingan atau kebutuhan manusia.

Populisme

Populisme adalah salah satu problem utama dalam kanca perpolitikan di abad ke-21. Istilah populisme digunakan untuk menggambarkan presiden bersayap kiri di Amerika Latin, partai penantang sayap kanan di Eropa, dan keduanya juga menunjuk

kandidat presiden sayap kiri dan sayap kanan di Amerika Serikat (Kaltwasser, 2017). *Term* tersebut memiliki daya tarik yang besar bagi banyak jurnalis dan pembaca, penggunaannya yang luas juga menimbulkan kebingungan dan frustrasi. Atas dasar itu pemahaman dan pengertian tentang populisme tidak bisa direduksikan pada satu pengertian saja. Cas Mudde memberikan definisi yang ketat terkait populisme. *“More concretely, we define populism as a thin-centered ideology that considers society to be ultimately separated into two homogeneous and antagonistic camps, “the pure people” versus “the corrupt elite,” and which argues that politics should be an expression of the volonté générale (general will) of the people* (Kaltwasser, 2017).

Pemikiran Cas Mudde menggarisbawahi keberadaan populisme sebagai sebuah strategi politik yang menghadap-hadapkan rakyat (*the pure people*) dengan pemerintah (*the corrupt elite*). Di mana aktor populis tampil seolah-olah mengakomodir aspirasi rakyat terpinggir dan memperjuangkan kepentingan rakyat yang dibebani pemerintah atau kaum elit. Dengan strategi seperti itu, aktor populis menggiring sedemikian rupa masyarakat sipil untuk membenci kaum elit. Padahal citra politik yang sedang diperjuangkan hanyalah pemuasan nafsu kaum populis sendiri dan pemenuhan kepentingan kelompok tertentu. Atas dasar itu, Cas Mudde melihat populisme tidak lain sebagai strategi politik dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat mayoritas untuk memenangkan sebuah kontestasi politik. Atau populisme ialah *kampfbegriff* politik (istilah pertempuran) untuk mengancam lawan politik (Kaltwasser, 2017). Senada dengan Mudde, Laclau dalam bukunya *On Populist Reason* mendefinisikan populisme sebagai strategi diskursif untuk mengontruksi batas politik yang membagi masyarakat ke dalam dua kubu dan menyerukan untuk memobilisasi rakyat (*underdog*) melawan penguasa (*those in power*) (Laclau, 2005).

Sementara itu, M. Kazin yang mengikuti pendekatan diskursif melihat populisme sebagai “sebuah keyakinan, gaya, strategi politik, taktik pemasaran, atau beberapa kombinasi di atas” (M. Kazin, 2016) Sedangkan K. Weyland dengan tegas mengatakan populisme adalah sebuah istilah yang selalu mengelak untuk didefinisikan (K. Weyland, 2017). Meskipun populisme menimbulkan perdebatan yang besar, baik

tentang makna maupun sifat dan karakter-karakternya bahkan penggunaan istilah ini masih menimbulkan polemik. Akan tetapi, secara sederhana populisme dapat dipahami sebagai sebuah gerakan untuk memobilisasi masyarakat untuk melawan pemerintahan yang berkuasa (politik elit). Atau, populisme adalah gerakan anti kemapanan dan anti pluralisme serta sebagai sebuah strategi untuk menjatuhkan lawan politik. Sebagai sebuah gerakan, populisme tentu bukanlah ideologi, tetapi lebih merupakan suatu strategi berpolitik. Sehingga, ia dapat menjelma dalam berbagai ideologi dan kompatibel dengan pelbagai struktur institusi (Mouffe, 2020).

Faktor-Faktor Kebangkitan Populisme

Kebangkitan dan perkembangan populisme tidak bisa dilepaspisahkan dari adanya krisis yang terjadi pada suatu masyarakat. Ketidakmenentuan kondisi sosial, ekonomi, dan politik menjadi sebab dasar terjadinya krisis. *Pertama*, kondisi sosial. Adanya kondisi sosial yang tidak nyaman dalam kehidupan masyarakat, seperti ancaman terorisme, bom bunuh diri, isu mayoritas-minoritas, anti imigran, dan sebagainya cenderung membangkitkan rasa tidak puas dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang berkuasa. Dalam kondisi miris demikian, permintaan masyarakat akan pemerintahan yang lebih baik niscaya menjadi semakin kuat.

Kedua, kondisi ekonomi. Realitas kemiskinan, pembangunan yang tidak merata, dan sebagainya membuat masyarakat geram dengan pemerintah yang berkuasa. Misalnya, setiap tahun angka kemiskinan tidak pernah menurun dan pada saat yang sama tindakan korupsi yang dilakukan pemerintah semakin meningkat. Realitas bobrok ini otomatis membangkitkan sisi *demand* atau permintaan masyarakat akan adanya tokoh pemerintahan yang mampu meretas aneka persoalan yang ada. *Ketiga*, kondisi politik. Wajah pemerintahan yang korup, otoriter, tidak responsif, dan sebagainya membangkitkan kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat. Selain itu, konflik antara pemerintahan elit dengan rakyat juga menjadi salah satu indikasi adanya krisis.

Krisis yang terjadi dalam ketiga dimensi kehidupan masyarakat sebagaimana disebutkan di atas membuka peluang bagi suburnya populisme di suatu tempat. Baik sisi

permintaan masyarakat dan juga sisi penawaran dari aktor populis semakin kuat dan meningkat. Dari segi sisi penawaran misalnya nampak dalam tampilnya aktor populis yang karismatik. Di ruang publik mereka hadir seolah-olah berpihak kepada kepentingan rakyat. Demikian pun dari segi sisi permintaan nampak dalam kondisi semakin kuatnya permintaan masyarakat akan pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan kredibel. Semuanya itu bermuara pada kecenderungan masyarakat untuk melihat peta politik dalam lensa populisme. Dan pada gilirannya ini menjadi titik penting dalam basis formasi identitas antara kami (rakyat) dan mereka (musuh) (Anisa Nur Nia Rahmah, 2019).

Media Massa dan Kebangkitan Populisme

Manusia selalu mencerpap informasi melalui media massa, seperti media cetak, elektronik, media sosial, dan sebagainya. Beragam informasi dan berita yang diterima oleh masyarakat kerap tidak hanya satu wajah, akan tetapi selalu tampil berwajah ganda. Di mana, berita dan informasi yang disebarkan media massa itu sekaligus memuat yang sungguh obyektif dan sifatnya subyektif semata. Persoalan ini menghantar masyarakat mengonsumsi dua pengetahuan sekaligus, yakni pengetahuan yang benar dan pengetahuan yang tidak benar. Masyarakat yang mendapatkan pengetahuan yang benar akan nampak dalam cara mengadanya yang lebih baik dan bijaksana di tengah *societas*. Sementara massa yang memperoleh pengetahuan yang tidak benar akan nampak dalam mengadanya yang tidak jelas di tengah masyarakat.

Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa kebangkitan dan penyebaran populisme di berbagai belahan dunia tidak bisa dilepaspisahkan dari pengaruh media massa yang selalu tampil berwajah ganda. Menurut Michael Foucault pada hakikatnya segala informasi yang terdapat pada media; media cetak, elektronik, media sosial dan lain sebagainya, tidak lepas dari kepentingan atau tendensi sumber informasinya. Artinya, terdapat subyektivitas dalam pemilihan informasi yang disebarkan. Foucault dalam salah satu wawancaranya dengan Michelle Perout dan Jean-Pierre Barou mengatakan bahwa media dilakukan untuk memenuhi kepentingan ekonomi-politik (Foucault, 2002). Tendensi keberadaan media demikian jelas menjadi hal yang sangat penting bagi

berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk kaum atau aktor populis.

Selanjutnya pertanyaan yang dapat diajukan ialah di mana letak peranan penting media massa dalam mempercepat laju perkembangan dan kebangkitan populisme? Menurut penulis, letak peranan penting media massa dalam mempercepat laju perkembangan dan kebangkitan populisme ialah tampak dalam hal-hal berikut ini. *Pertama*, tampak dalam eksistensi media massa yang banyak mengekspos berita-berita terkait wajah buruk pemerintahan yang berkuasa. Misalnya, media massa tidak henti-hentinya menyajikan berita-berita tentang pemerintahan korup, otoriter, tidak responsif dan sebagainya. Beragam agenda yang dilakukan media massa tersebut jika dilakukan terus menerus, maka otomatis akan menjadi agenda pembicaraan massa juga. Semakin gencar media massa mengekspos atau membesarkan isu sensitif demikian, semakin hangat dan ramai topik tersebut dibicarakan masyarakat. Sehingga, berdampak pada lahirnya citra buruk akan pemerintahan yang sedang berkuasa.

Kedua, tampak dalam eksistensi media massa yang tidak kredibel dan obyektif dalam memilih suatu informasi yang diberitakan. Misalnya, media massa sengaja menyebarkan informasi miris provokatif yang bertendensi mendiskreditkan pemerintahan elit dengan menuding bahwa pemerintah hanya berpihak pada kelompok dan daerah atau wilayah tertentu saja (Basya, 2019). Padahal sejatinya segala informasi yang diberitakan tidaklah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pemerintah tetap merangkul semua orang dan berusaha untuk tidak seorang pun teralienasi atau terpinggirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan begitu massa menerima informasi demikian terus menerus dan merasa yatim piatu oleh aktor politik yang sudah mapan (pemerintah yang berkuasa), mereka pun jatuh pada tendensi menafsirkan peristiwa politik melalui peta mental populisme: "Elit hanya peduli pada diri sendiri dan tidak tertarik keprihatinan orang-orang (Kaltwasser, 2017)."

Ketiga, tampak dalam tendensi media massa yang secara khusus menampilkan tokoh-tokoh tertentu yang notabene adalah kaum atau aktor populis. Media massa berkonspirasi dengan tokoh-tokoh karismatik tersebut, sehingga bisa tampil di ruang publik melalui media-media yang telah

ditunggangnya demi menarik simpati rakyat. Melalui media massa yang mendukungnya, para aktor populis tampil seolah-olah berpihak kepada kepentingan rakyat dan mengakomodasi segala aspirasi rakyat yang tidak diakomodir oleh pemerintah yang berkuasa. Sehingga, aktor populis yang dipromosikan media massa *per se* mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menentukan pilihannya pada saat pesta demokrasi atau pemilihan umum.

Pengaruh Media Massa terhadap Sisi Permintaan dan Sisi Penawaran Populisme

Tendensi subyektif eksistensi media massa sebagaimana diuraikan di atas berdampak pada semakin kuatnya sisi permintaan dan sisi penawaran populisme. *Pertama*, sisi permintaan. Wajah buruk pemerintahan elit (seperti korupsi, otoriter, tidak responsif dan sebagainya), sangat pasti membuat hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan yang berkuasa. Apa lagi isu provokatif yang tidak benar dan obyektif yang diekspos media massa niscaya membuat orang marah dan rentan untuk menafsirkan realitas politik melalui lensa populisme. Masyarakat menghendaki adanya pemerintahan dari kaum populis yang dianggap bisa meretas beragam masalah yang ada. Sehingga, realitas demikian meningkatkan sisi permintaan mereka akan pemerintahan yang lebih baik; lebih bijaksana dan responsif dari kaum populis sendiri.

Kedua, sisi penawaran. Besarnya permintaan masyarakat akan pemerintahan yang lebih baik melahirkan peluang besar bagi meningkatnya sisi penawaran populisme. Tokoh karismatik mengambil kesempatan yang ada, terus tampil seolah-olah berpihak kepada kepentingan rakyat. Mereka bekerjasama dengan media massa untuk semakin meyakinkan dan menarik simpati rakyat. Aktor populis yang cerdas mampu menggabungkan berbagai keluhan masyarakat seputar wacana populis "kami, orang baik" melawan "mereka, elit korup" di media massa, tentu akan mendapat banyak dukungan dari masyarakat dan kemungkinan akan memenangkan kontestasi pemilu (Habibie, 2018:82). Dalam hal inilah populisme akan semakin berkembang biak, apalagi jika media massa terus menerus mengekspos berita buruk terkait pemerintahan yang berkuasa dan pada saat yang sama menampilkan aktor populis yang karismatik ke ruang publik.

Besarnya pengaruh media massa dalam membangkitkan laju perkembangan populisme sebagaimana diuraikan di atas mendapat penegasan dari Cash Mudde. Dalam pengamatannya banyak media massa kurang dikendalikan oleh elit politik. Di banyak negara, surat kabar awalnya sangat kuat dimiliki dan dioperasikan oleh politik yang mapan, sedangkan radio dan televisi dimiliki dan dikuasai secara eksklusif oleh negara, yang berarti mereka adalah partai pro-pemerintah atau pro-arus utama (termasuk partai oposisi yang mapan). Namun, sekarang hanya surat kabar yang kurang lebih independen dari partai politik, sementara radio dan televisi negara kehilangan banyak pendengarnya kepada pesaing komersial. Mereka semua harus bersaing dengan sumber media *online* yang terus bertambah. Dalam hal ini luar biasa pasar kompetitif dan akibatnya pengontrolan terhadap media *online* yang beragam jenisnya pun tidak bisa dilakukan dengan baik. Menurut Cash Mudde, semua ini telah menciptakan budaya politik yang tidak benar dan hanya satu yang pasti yakni lebih kondusif untuk pesan populis. Apalagi jika media *online* fokus pada masalah politik yang serius dan meningkatkan cakupannya pada isu-isu yang mempunyai nilai jual tinggi, seperti kejahatan dan korupsi.

Upaya Mengatasi Populisme

Eksistensi media massa sebagaimana dijelaskan di awal sangat berperan penting dalam membangkitkan lajunya perkembangan populisme di seluruh dunia. Bangkitnya populisme secara umum mencederai wajah perpolitikan suatu bangsa. Memang di satu sisi ia hadir mengakomodir aspirasi kaum terpinggir dan memunculkan ke ruang publik masalah pemerintahan elit yang tersembunyi. Namun, di sisi lain justru merusak iklim politik atau mengakibatkan disintegrasi dan ketidakstabilan politik suatu negara. Sebab mereka kerap anti keamanan dan pluralisme. Berhadapan dengan realitas problematika tersebut penulis menawarkan sebuah jalan ke luar untuk meminimalisir kebangkitan populisme terutama yang disebabkan oleh media massa.

Pertama, pentingnya kredibilitas dan obyektivitas media massa. Di mana dalam meliput dan mengekspos informasi atau berita, media massa harus akurat (*accuracy*), cermat, dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena itu berita yang diekspos bukan opini rancu media sendiri, tetapi sungguh

berdasarkan realitas di lapangan. Bahkan dalam artian tertentu obyektivitas saja belumlah cukup, tetapi mesti memuat nilai keadilan yang mana berita dan informasi yang disebarkan ke ruang publik seimbang dan tidak berat sebelah. Misalnya, media massa tidak hanya mengekspos berita seputar wajah buruk pemerintahan (KKN, tidak responsif, dan sebagainya), tetapi juga menampilkan ke ruang publik tindakan khaos aktor atau kaum populis. Sehingga massa kemudian mendapat pengetahuan holistik dan bukan hanya setengah-setengah yang kerap dangkal tentang kedua hal ini. Selain itu, obyektivitas memaksudkan bahwa media harus sungguh-sungguh menjunjung tinggi kebenaran. Artinya kebenaran adalah tujuan utama atau orientasi dasar berita yang disajikan di ruang publik. Sehingga dalam hal ini, media massa tidak bisa seenaknya saja bekerjasama dengan pihak tertentu dan dikuasai olehnya untuk suatu kepentingan yang tidak manusiawi. Misalnya, media massa tidak boleh bekerjasama dengan aktor populis. Sebab, apabila hal ini terjadi, maka konsekuensi logisnya obyektivitas dan kebenaran berita-berita dan informasi yang diekspos tidak akan terjamin. Bahkan muatan nilai keadilan pun tidak ada di sana.

Kedua, urgensi nalar kritis individu. Media massa memiliki aneka jenis. Status kepemilikannya pun tidak hanya satu dua orang saja, tetapi selalu melebihi itu. Dengan eksisnya media massa yang tidak terhitung jumlah kepemilikannya, informasi-informasi yang diekspos ke ruang publik pun otomatis beragam. Ada informasi atau berita yang obyektif dan ada pula yang sifatnya subyektif semata, sehingga berpengaruh bagi konstruksi pengetahuan individu atau pribadi yang mengonsumsinya. Berhadapan dengan problematika seperti ini, urgensi nalar kritis setiap pribadi sangat dibutuhkan. Nalar kritis memaksudkan untuk menilai; melihat dengan cermat dan rasional realitas (berita atau informasi) yang ada. Memilah-milahkan dan membeda-bedakannya; mana informasi yang sungguh-sungguh obyektif dan mana informasi yang sifatnya subyektif-provokatif. Atau mana informasi yang sungguh-sungguh berdasarkan fakta dan mana yang sifatnya opini rancu semata. Sehingga, dari aktivitas menilai secara kritis itu, masyarakat akan memperoleh pengetahuan holistik mengenai berita dan informasi yang diekspos oleh media massa serta tidak dengan mudah terhanyut begitu saja dalam lautan informasi yang ada. Misalnya, orang tidak langsung

bereaksi ketika melihat dan mendengar berita seputar wajah buruk pemerintahan dan kemudian segera menafsirkan realitas politik melalui lensa populisme. Atau ketika aktor populis karismatik tampil di ruang publik, orang tidak langsung mengklaim bahwa “pemerintahan yang baik, hanya akan terwujud jika dipimpin aktor populis.”

Ketiga, pentingnya fungsi kontrol negara. Realitas banyaknya media massa yang bersebaran di ruang publik, tidak dapat dipungkiri akan menciptakan kekhaosan informasi. Hal ini biasanya disebabkan karena adanya persoalan perbedaan kepentingan media dalam menginterpretasi dan mengekspos berita (Hamad, 2004:3). Bahkan satu topik persoalan saja bisa melahirkan ratusan interpretasi. Akibatnya, orang atau masyarakat yang mencerna berita dan informasi dari berbagai jenis media tersebut pun sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat dan benar. Berhadapan dengan hal ini, betapa pentingnya fungsi kontrol negara untuk *manage* dan menertibkan media massa agar tetap berpegang pada kebenaran dan obyektivitas dalam mengekspos berita. Misalnya, untuk media massa yang bertendensi provokatif dan dengan pasti memimak kaum atau aktor populis tertentu, harus segera diberhentikan. Sebab apabila media massa yang demikian terus dibiarkan, konsekuensi logisnya benih populisme terus mengakar dan berkembang. Pentingnya fungsi kontrol negara terhadap media massa juga bertujuan untuk membantu proses mobilisasi kognitif. Sehingga masyarakat tidak mudah diberdaya oleh aktor populis dengan menggunakan media massa yang ada. Sebab jika mobilisasi kognitif hanya terbatas di daerah dan kalangan tertentu, maka akan dengan sangat mudah aktor populis memberdaya masyarakat. Hal inipun semakin diperkuat apabila aspirasi demokratis dan sentimen anti kemapanan bersatu, terutama di antara kelompok besar tertentu yang terdiskriminasi kelompok sosial, maka sentimen populis akan diaktifkan.

Relevansi

Laju perkembangan dan kebangkitan populisme dalam dua dekade terakhir tidak bisa dinegasikan juga mewabah di tubuh perpolitikan Indonesia. Menurut Budiman, menguatnya populisme di Indonesia berawal dari pemilu 2014, saat kandidat Jokowi dan Prabowo bertarung memperebutkan tahta kepresidenan. Kehadiran kedua kandidat tersebut masing-masing membawa narasi

terpuji yang berpangkal pada kepentingan rakyat. Kandidat Jokowi mengetengahkan pentingnya reformasi birokrasi, karena pemerintahan elit telah lama terjerat dalam lingkaran korupsi yang mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia (Budiman, 2021). Sementara kandidat Prabowo mengusung narasi ‘anti-asing’ yang timbul dari keresahannya akan kondisi pemerintahan Indonesia yang banyak didominasi oleh kaum elit tertentu dan telah menggerus sumber daya milik negeri. Pada konteks ini, baik Jokowi dan Prabowo berusaha tampil sebagai pengakomodir jeritan kaum terpinggir (Welak, 2022).

Berbeda dengan Jokowi, narasi gerakan anti pluralisme yang dibangun Prabowo sangat miris karena bertentangan dengan semangat pancasilais masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai falsafah dasar bangsa Indonesia memuat di dalamnya nilai-nilai yang menjunjung tinggi setiap perbedaan (suku, bahasa, bangsa, ras, golongan, agama, dst.) dan mengayomi sesama tanpa ada yang teralienasi atau merasa tertindas. Sehingga narasi yang dimunculkan Prabowo ke ruang publik memicu disintegrasi bangsa dan ketidakstabilan dinamika perpolitikan di Indonesia. Fenomena tersebut dapat ditemukan dalam kemunculan gerakan populisme Islam, yakni Front Pembela Islam (FPI) yang sangat jelas berpihak pada Prabowo. Kelompok ini secara tegas membangun narasi anti kaum elit dan etnis Tionghoa yang dipandang mendominasi perekonomian di Indonesia.

Mewabahnya populisme di Indonesia yang bermula pada pemilu 2014 dan yang semakin kentara pada pemilu 2017 saat di mana Anisbaswedan memobilisasi kelompok sayap kanan Islam demi memenangkan PILGUB DKI Jakarta, (Adon, 2021) tidak dapat dipungkiri juga dipengaruhi oleh kehadiran media massa. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia yang semakin maju dari sendirinya turut mendukung dan menjadi sarana ampuh suburnya gerakan populisme. Berdasarkan hasil penelitian tentang penggunaan media massa seperti internet menunjukkan bahwa pada permulaan tahun 2022 sebesar 204,7 juta pengguna dari total penduduk 277,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, sebesar 202,6 juta pengguna internet pada tahun 2021 di Indonesia. Realitas ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia banyak mengonsumsi informasi dari media sosial dan adanya penyebaran

atau perputaran informasi yang semakin cepat.

Berbagai informasi yang diekspos oleh media massa yang tersebar di kalangan masyarakat Indonesia dalam artian tertentu tidak terlepas dari balutan berbagai kepentingan politik, sehingga banyak informasi yang tidak kredibel dan bertendensi subyektif provokatif. Kondisi miris seperti ini semakin diperparah lagi terutama ketika adanya kerjasama atau konspirasi naif antara media massa dengan aktor populis. Contoh nyatanya ialah dalam keberpihakan TV One terhadap kandidat Prabowo-Hatta dan Metro TV kepada Jokowi-JK pada pesta demokrasi 2014 (Belekubun et al., 2015). Baik TV One dan Metro TV membangun opini terpuji sedemikian rupa terhadap tokoh politik Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, pun sebaliknya membentuk opini yang saling mencedari satu sama lain, sehingga sisi permintaan dan penawaran populisme di Indonesia semakin meningkat. Masyarakat Indonesia semakin menginginkan pemerintahan yang lebih baik dan kesempatan demikian menjadi peluang indah bagi aktor populis tampil ke ruang publik membawa narasi terpuji yang seolah-olah mengakomodir suara kaum terpinggir.

Pada titik inilah, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengkritisi secara tegas berbagai informasi yang dihadirkan media massa. Sehingga, ketika aktor populis karismatik tampil di ruang publik, masyarakat Indonesia tidak langsung mengklaim bahwa pemerintahan yang baik, hanya akan terwujud jika dipimpin aktor populis. Atau masyarakat Indonesia tidak segera menafsirkan realitas politik melalui lensa populisme, ketika melihat wajah buruk pemerintahan elit. Selain itu, yang tidak kalah penting juga ialah peranan petinggi negara Indonesia untuk mengontrol berbagai media massa yang hadir di ruang publik agar tetap berjalan pada koridor yang seharusnya, yang mana mengutamakan kebenaran dan obyektivitas. Sehingga, gerakan populisme yang mengancam disintegrasi bangsa Indonesia dapat diminimalisir sedini mungkin.

KESIMPULAN

Hingga pada titik ini ditemukan nilai fungsional media massa dalam memantapkan keamanan citra politik yang dibangun populisme. Media massa menjadi instrumen ampuh yang menjadikan masyarakat semakin teralienasi dan menjadi candu pada jargon-jargon politik para populis. Peluang

kemenangan populisme dalam pesta demokrasi semakin terbuka lebar. Media massa seolah menjadi titik temu antara sisi permintaan dan penawaran yang digunakan populis dalam bingkai kerangka kerjanya. Konsekuensinya jelas bahwa masyarakat terus digiring pada suatu sikap paranoid. Mereka meragukan keamanan dan otoritas kewibawaan pemerintah dan berpuas diri pada mimpi kehadiran tokoh pemimpin ideal yang merangkul semua cita-cita kolektif masyarakat. Padahal, itu adalah sesuatu yang sungguh amat absurd. Selagi media massa memberikan tempat bagi para populis untuk menghadap-hadapkan rakyat dan pemerintah yang berkuasa, maka sejauh itu pula kehadiran pemimpin ideal bagai teka-teki tanpa akhir. Logika yang mau disampaikan ialah bahwa penting untuk mengidentifikasi dan mewaspadaai cara kerja populis melalui media massa. Soalnya, kemenangan populis hanya tampaknya saja membawa kepentingan masyarakat umum, sebab yang diuntungkan hanyalah kepentingan para populis atau sekelompok orang saja. Maka, hidup dalam keragu-raguan barangkali menjadi pilar reformatif untuk selalu mempertanyakan apa yang disajikan dalam dan melalui media massa.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Adon, M. J. (2021). Melawan Fenomena Populisme dengan Semangat Pancasila sebagai Dasar Persatuan dan Kesatuan Bangsa. *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)*, 11(2), 81–92.
- 2) Akmaliah, W. (2019). Kebenaran Yang Terbelah: Populisme Islam dan Disinformasi Politik Elektoral. *Maarif*, 14(1), 129–149. <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.53>
- 3) Anisa Nur Nia Rahmah. (2019). Pasang Surut Populisme: Sate dekade Populisme Basyir Ahmad di Pekalongan. *PolGov*.
- 4) Basya, M. H. (2019). Populisme Islam, Krisis Modal Sosial dan Tantangan Terhadap Demokrasi: Refleksi Pemilu 2019. *Maarif*, 14(1), 43–59. <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.48>
- 5) Belekubun, S., Unde, A. A., & Cangara, H. (2015). Opini tokoh partai politik terhadap keberpihakan TV One dan Metro TV dalam pilpres 2014 di Sulawesi Selatan. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 4(2), 88–100.
- 6) Budiman, B. N. (2021). Populisme Di Indonesia Sebagai Ancaman Polarisasi Masyarakat. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(02), 235–246. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.53>
- 7) Foucault, M. (2002). *Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Bentang.

- 8) Hilmy, M. I. (2020). Fenomena Gerakan Populisme Dalam Kemunduran Demokrasi. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 145–156. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13080>
- 9) K. Weyland. (2017). Populism: A political-strategic approach. In & P. O. (Eds. . Cristóbal Rovira Kaltwasser, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo (Ed.), *The Oxford handbook of populism*. Oxford University Press.
- 10) Kaltwasser, C. M. and C. R. (2017). *Populism: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- 11) Laclau, E. (2005). *On Populist Reason*. Verso.
- 12) M. Kazin. (2016). *Trump and American populism*. Foreign Affairs.
- 13) Mouffe, C. (2020). *Populisme Kiri (Judul Asli: For a Left Populism)*. Antinomi.
- 14) Nurudin. (2007). *Pengantar Komunikasi Massa*. Raja Grafindo Persada.
- 15) Welak, F. (2022). Populisme di Indonesia: Ancaman bagi Integritas Masyarakat dan Reaktualisasi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 02(01).